

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Analisis Analisis *Location Quotient* (LQ) pada 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki keunggulan komparatif pada sektor ekonomi yang berbeda-beda. Sektor basis di Pulau Jawa didominasi oleh sektor jasa, terutama Sektor P Jasa Pendidikan yang menjadi sektor basis pada 66 kabupaten/kota (55,46%), selanjutnya Sektor O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib serta Sektor RSTU Jasa Lainnya yang menjadi sektor basis pada 65 kabupaten/kota (54,62%), Sektor K Jasa Keuangan dan Asuransi pada 60 kabupaten/kota (50,42%), serta Sektor A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada 59 kabupaten/kota (49,58%). Nilai LQ tertinggi terdapat pada Kabupaten Gresik sebesar 8,883 pada Sektor D Pengadaan Listrik dan Gas, Kota Cirebon sebesar 7,160 dan Kota Bandung sebesar 6,170 pada Sektor G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Kabupaten Pandeglang sebesar 5,979 pada Sektor B Pertambangan dan Penggalan. Sebaliknya, nilai LQ terendah terdapat pada Kota Bandung sebesar 0,002 pada Sektor A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Kota Tasikmalaya sebesar 0,014 pada Sektor D Pengadaan Listrik dan Gas, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar 0,032 pada Sektor K Jasa Keuangan dan Asuransi, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar 0,045 pada Sektor L *Real Estate*, serta Kota Yogyakarta sebesar 0,017 pada Sektor A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Hasil analisis *Shift Share* pada Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPPW) menunjukkan bahwa daya saing ekonomi Pulau Jawa didominasi oleh Sektor C Industri Pengolahan dengan 94 kabupaten/kota berdaya saing (78,99%), selanjutnya Sektor F Konstruksi sebanyak 89 kabupaten/kota berdaya saing (74,79%), Sektor A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebanyak 79 kabupaten/kota berdaya saing (66,39%), Sektor J Informasi dan Komunikasi sebanyak 74 kabupaten/kota berdaya saing (62,18%), serta Sektor G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebanyak 70 kabupaten/kota berdaya saing (58,82%). Nilai KPPW tertinggi terdapat pada Kota Probolinggo sebesar 138,17% pada Sektor H Transportasi dan Pergudangan, Kota Batu sebesar 133,37% pada Sektor RSTU Jasa Lainnya, Kabupaten Gresik sebesar 114,85% pada

Sektor D Pengadaan Listrik dan Gas, serta Kabupaten Sumedang sebesar 112,34% pada Sektor H Transportasi dan Pergudangan. Sebaliknya, nilai KPPW terendah terdapat pada Kabupaten Pamekasan sebesar -66,46% pada Sektor C Industri Pengolahan, Kota Sukabumi sebesar -51,63% pada Sektor F Konstruksi, Kabupaten Pangandaran sebesar -51,62% pada Sektor F Konstruksi, Kabupaten Situbondo sebesar -35,07% pada Sektor F Konstruksi, dan Kabupaten Trenggalek sebesar -35,01% pada Sektor F Konstruksi.

Klasifikasi tipologi sektor unggulan menunjukkan bahwa struktur ekonomi Pulau Jawa bertumpu pada sektor tersier. Sebanyak 39 kabupaten/kota (32,8%) termasuk kategori sektor tersier, 27 kabupaten/kota (22,7%) termasuk kategori sektor primer, 25 kabupaten/kota (21,0%) termasuk kategori sektor sekunder, dan 28 kabupaten/kota (23,5%) tidak memiliki sektor unggulan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan, jasa, transportasi, informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, serta kegiatan jasa lainnya menjadi dominan dalam perekonomian wilayah di Pulau Jawa. Sektor tersier terdapat pada Kota Bandung (LQ 6,170; KPPW 32,79), Kota Surabaya (LQ 2,116; KPPW 88,59), Kota Semarang (LQ 1,641; KPPW 3,03), Kota Yogyakarta (LQ 1,500; KPPW 1,09), dan Kota Tangerang Selatan (LQ 2,593; KPPW 11,48). Sektor primer terdapat pada beberapa wilayah agraris seperti Kabupaten Garut (LQ 1,897; KPPW 78,26), Kabupaten Tasikmalaya (LQ 1,334; KPPW 77,46), Kabupaten Indramayu (LQ 1,840; KPPW 86,60), Kabupaten Bondowoso (LQ 1,029; KPPW 52,34), Kabupaten Lamongan (LQ 1,270; KPPW 47,17), dan Kabupaten Lebak (LQ 2,504; KPPW 2,34). Sektor sekunder terdapat pada kawasan industri seperti Kabupaten Gresik (LQ 8,883; KPPW 114,85), Kabupaten Purwakarta (LQ 1,084; KPPW 24,03), Kabupaten Pasuruan (LQ 1,824; KPPW 55,12), Kabupaten Mojokerto (LQ 1,201; KPPW 58,03), dan Kota Kediri (LQ 2,424; KPPW 40,50).

Hasil analisis sebaran jumlah tipologi sektor unggulan pada 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa menunjukkan bahwa keberagaman struktur ekonomi antarwilayah masih sangat tidak merata. Klasifikasi jumlah sektor unggulan terbagi ke dalam lima kelas, yaitu kelas 0–1 sektor sebanyak 56 kabupaten/kota (47,06%), kelas 2–3 sektor sebanyak 31 kabupaten/kota (26,05%), kelas 4–5 sektor sebanyak 20 kabupaten/kota (16,81%), kelas 6–7 sektor sebanyak 8 kabupaten/kota (6,72%), serta kelas 8–9 sektor sebanyak 4 kabupaten/kota (3,36%) dari total 119 kabupaten/kota. Wilayah dengan jumlah sektor unggulan paling rendah (0–1 sektor) banyak ditemukan pada kabupaten non-metropolitan seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kudus, serta sebagian besar kabupaten di kawasan Mataraman dan Madura, Jawa Timur, seperti Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Bangkalan, dan Pamekasan, yang menunjukkan struktur ekonomi yang masih

bertumpu pada satu sektor basis atau bahkan belum memiliki sektor basis yang kompetitif. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah sektor unggulan tertinggi (8–9 sektor) hanya terdapat pada 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Gresik, dan Kota Tangerang Selatan, sementara kelas 6–7 sektor ditemukan pada Kota Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Madiun, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon. Secara keseluruhan, sebanyak 89,92% kabupaten/kota di Pulau Jawa berada pada kelompok 0–5 sektor unggulan, sedangkan hanya 10,08% yang berada pada kelompok 6–9 sektor unggulan. Proses pemetaan sebaran jumlah tipologi sektor unggulan dilakukan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menghasilkan visualisasi spasial tingkat keberagaman struktur ekonomi antarwilayah di Pulau Jawa.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk arahan pengembangan ekonomi sektor unggulan di Pulau Jawa, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

a. Bagi Instansi Pendidikan

Program studi yang berkaitan, khususnya bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Perencanaan Wilayah dan Kota, Geografi, serta Ekonomi Pembangunan, disarankan untuk meningkatkan pemanfaatan data statistik dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam pembelajaran analisis wilayah. Penguasaan metode *Location Quotient* (LQ), *Shift Share*, serta pengolahan data spasial menggunakan SIG perlu diperkuat agar mahasiswa mampu mengidentifikasi sektor unggulan dan memahami variasi karakteristik ekonomi antarwilayah. Integrasi analisis ekonomi dengan SIG penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis spasial, sehingga perumusan arahan pengembangan ekonomi dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kondisi keruangan masing-masing wilayah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian ekonomi wilayah dengan menambahkan variabel pendukung selain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), seperti penyerapan tenaga kerja atau investasi. Selain itu, penelitian dapat menggunakan metode analisis lain, seperti Model Gravitasi untuk menganalisis interaksi ekonomi antardaerah. Integrasi metode tersebut dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat memberikan informasi spasial yang akurat dalam mendukung perencanaan dan pengembangan wilayah.